

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Umat Islam telah menjalani pasang surut peradaban selama lebih dari 14 abad. Setelah era Nabi Muhammad saw (570-632 M), Khulafaur Rasyidin (11-40 H/632-661 M), Bani Umayyah (41-132 H/661-749 M) dan Bani Abbasiyah (132-656 H/749-1218 M) berhasil mewujudkan dan memelihara kejayaan Islam, maka umat Islam mengalami kejatuhan yang bermula oleh invasi bangsa Mongol pada tahun 650 H/1258 M. Begitulah seterusnya, roda terus berputar hingga umat Islam kembali berjaya pada Dinasti Turki Usmani yang berkuasa hingga jatuh pada abad ke-19 M.

Pada masa kolonial, hampir seluruh dunia Islam dijajah oleh bangsa Eropa. Praktis umat Islam pun melemah dan kehilangan kendali atas politik, ekonomi, bahkan dunia keilmuan. Semuanya terus berjalan nyaris tanpa perubahan, hingga pada abad ke-19 M, lahirlah gerakan yang dikenal dengan istilah "*Pembaharuan*" yang bermaksud untuk memulihkan kembali keilmuan Islam dan kebangkitan politik yang bertujuan untuk kebangkitan dan kemerdekaan umat Islam dari penjajahan. Gerakan pembaharuan dalam Islam berkembang dan menyebar dengan cepat hingga ke sebagian besar negara yang sedang terjajah, termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengalami penjajahan hingga menyebabkan keterpurukan dalam berbagai bidang,

terutama bidang ekonomi, ilmu dan sosial politik. Pada awal abad ke-20, kebangkitan umat Islam lokal mulai terlihat dengan timbulnya berbagai organisasi pendidikan dan keagamaan seperti lahirnya Muhammadiyah 1912 M, Sarekat Islam 1912 M, dan Nahdlatul Ulama (NU) 1926 M, serta berbagai ormas lain hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia dapat merebut kemerdekaan dan memproklamasikannya. Berbagai ormas Islam di atas terus eksis di Indonesia hingga pada masa setelah kemerdekaan terbentuk kekuatan-kekuatan politik Islam yang memiliki andil besar dalam menentukan arah bangsa Indonesia. Sejak pra kemerdekaan hingga masa setelah kemerdekaan umat Islam terlibat aktif dalam perjalanan bangsa Indonesia dalam bidang politik dan pemerintahan.

Di kalangan umat Islam sendiri sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan, yaitu:

*Pertama*, aliran yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Umumnya para penganut aliran ini berpendirian bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, salah satu tokoh dari aliran ini ialah Hasan Al-Banna.

*Kedua*, aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan.

Menurut aliran ini Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara, tokoh dari aliran ini ialah Ali Abd. Raziq.

*Ketiga*, aliran yang menolak Islam sebagai suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan (politik). Aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara, tokoh dari aliran ini ialah Muhammad Hussein Haikal.<sup>1</sup>

Untuk mengatur sebuah pemerintahan, manusia secara tidak langsung akan menggunakan politik. Menurut Max Weber, politik adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik di antara negara-negara maupun di antara kelompok-kelompok di dalam suatu negara.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki pemikiran dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan beberapa instrumen yang baik untuk mengatur berbagai persoalan di antara sesama manusia dibutuhkan sebuah pemerintahan atau pemimpin. Dalam Al-Qur'ān surat An-Nisa' ayat 59; Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu*”.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Munawir Sajzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999), h. 1.

<sup>2</sup> Rafael Ragan Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2007), h. 22.

<sup>3</sup> Tim Penulis, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif, 1990), h. 128.

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam agama Islam rakyat diperintahkan untuk mentaati pemimpin atau mentaati pemerintah. Selain itu ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatiannya dalam hal kepemimpinan. Hal ini seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 165; Allah swt berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

Artinya: *“dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu”*.<sup>4</sup>

Ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa posisi manusia ialah sebagai khalifah yang mengatur kehidupan bersama di muka bumi, hal ini juga dapat diartikan sebagai legitimasi bagi umat Islam untuk mengatur pemerintahan atau bisa pula disebut berpolitik.

Berkaitan dengan pemerintahan, Nabi Muhammad juga memberikan perhatian khusus seperti dalam doa yang termuat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Syimah:

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْفُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

Artinya: *"Ya Allah, barangsiapa yang memegang jabatan dalam urusan ummatku lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Dan baragsiapa memegang*

---

<sup>4</sup> Tim Penulis, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., h. 217.

*jabatan dalam urusan ummatku lalu dia berusaha memberikan pertolongan kepada mereka maka tolonglah dia"* (Hadīṣ riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>5</sup>

Berikut ini Pandangan mengenai politik dari beberapa tokoh muslim:

- Hasan al-Banna: “Sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi seorang politikus, mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya”.
- Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa Islam harus ditegakkan dengan dua hal: Al-Qur’ān dan pedang. Al-Qur’ān merupakan sumber hukum-hukum Allah sedangkan pedang melambangkan kekuatan politik atau kekuasaan yang menjamin tegaknya isi Al-Qur’ān.

Keterlibatan umat Islam dalam dunia politik terus menjadi polemik, padahal jika semua sendi kehidupan diatur berdasarkan tuntunan Islam, niscaya kehidupan sebuah bangsa akan damai dan sejahtera. Namun, yang dapat menerapkan peraturan ialah pemerintahan yang sah dan berdaulat, lalu yang menjadi permasalahan ialah jika pemerintahan yang berkuasa tidak menggunakan ajaran Islam dalam pemerintahannya atau yang berkuasa bukan seorang muslim atau seorang muslim yang tidak memahami ilmu agama.

Umat Islam harus terlibat langsung dalam perpolitikan nasional ataupun memegang kekuasaan negara, karena negara merupakan alat paling utama untuk

---

<sup>5</sup> Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 713.

menjalankan sesuatu dan menghadapi banyak problem.<sup>6</sup> Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat<sup>7</sup>. Lenin mengatakan, “the state is the product and the aniestation of the irreconcillability of class antagonisms”.<sup>8</sup> Dalam kaitan dengan masalah ini Al-Ghazali melukiskan hubungan antara agama dan kekuasaan politik dengan ungkapan “Sultan (di sini diberi kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama; ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para rasul. Jadi, wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya”.<sup>9</sup>

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, lembaga-lembaga pemerintah memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk mengatur jalannya roda pemerintahan. Berdasarkan hal itu pula, jika umat Islam ingin memperjuangkan rakyat, maka umat Islam dari berbagai kalangan dapat terjun ke dalam dunia politik, baik yang berlatar belakang pengusaha, akademisi, para Ulama, atau bahkan santri sekalipun.

Keterlibatan santri dalam mengatur pemerintahan merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti berkaitan dengan materi pendidikan yang ia terima, pergaulan serta lingkungannya. Pondok pesantren selain sebagai lembaga

---

<sup>6</sup> Wayne Parson, *Public Policy*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 235.

<sup>7</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 38.

<sup>8</sup> Antonio Gramsci, *Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 107.

<sup>9</sup> M. Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 28.

pendidikan yang berbasis agama (*educational institution religion*) yang menjadi pusat penggemblengan nilai-nilai, pengajaran serta penyiaran agama Islam, ia juga menjadi mobilitas horizontal (kesadaran sosial). Dari pesantren lah lahir cikal bakal para ulama, atau bisa juga dikatakan bahwa para santri itulah yang merupakan cikal bakal ulama di masa mendatang karena santri dikenal sebagai orang yang mendalami agama Islam.<sup>10</sup>

Pengamatan mengenai santri dalam perpolitikan nasional semakin menarik dengan adanya modernisasi politik yang merupakan maestro kebijakan politik pemerintah Orde Baru, dianggap banyak ahli telah mencairkan politik aliran. Namun tanpa disadari oleh si pelaku politik itu sendiri, aliran budaya atau keagamaan masih menjadi akar bagi segala soal di belantara politik nasional hingga pemilu pertama pada tahun 1955 dan di masa reformasi sejak 1990-sekarang. Pola aliran, tampak masih akan muncul di berbagai pemilu di negeri ini. Karena itu, pengamatan mengenai perpolitikan kaum santri masih merupakan persoalan yang penting dilakukan, terutama bagi pengembangan kebijakan dan strategi budaya bagi politik santri dalam memenangkan tujuan-tujuan besar politik bagi kepentingan Islam yang lebih universal dan bagi kepentingan kemanusiaan dan bangsa yang lebih luas.<sup>11</sup>

Perkataan pesantren berasal dari kata *santri* yang diberi awalan *pe* dan akhiran *an* berarti tempat tinggal para santri. Sedangkan asal-usul kata “santri”, ada dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa santri berasal dari perkataan *sastri*, dari bahasa sanskerta yang artinya *melek* huruf. Zamakhsari

<sup>10</sup> Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 997.

<sup>11</sup> Abdul Munir Mulkan, *Moral Politik Santri*, (Jakarta: Erlangga, 003), h. V.

Dhofir berpendapat, kata *santri* dalam bahasa India berarti “orang yang tahu buku-buku suci”, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan *santri* berasal dari bahasa Jawa, dari kata “*cantrik*”, berarti orang yang selalu mengikuti guru ke mana guru pergi dan menetap.<sup>12</sup>

Dengan demikian, pondok pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga menjadi lembaga sosial yang hidup, yang terus merespon carut marut persoalan dalam masyarakat.<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut, para pelajar di pondok pesantren atau yang lebih sering disebut *santri*, tentu turut berperan dalam menyiarkan agama Islam dan mengembangkan kesadaran masyarakat terutama umat Islam dalam berbagai bidang sosial, politik, hukum, dan berbagai hal lain dalam bidang keagamaan.

Pesantren memiliki unsur-unsur yang dalam hal-hal tertentu membedakan dengan sistem pendidikan lainnya. Unsur-unsur itu meliputi kiai, *santri*, masjid, pondok (asrama), dan pengajian kitab kuning. Keterpaduan unsur-unsur tersebut membentuk suatu sistem dan model pendidikan yang khas, sekaligus membedakan dengan pendidikan formal.<sup>14</sup> Hal tersebut menjadikan ciri khas tersendiri dan memberikan dampak sosial keagamaan yang khas bagi masyarakat Indonesia.

Kiai merupakan pusat kekuasaan tunggal yang mengendalikan sumber-sumber pengetahuan dan wibawa, dan menjadi sandaran bagi santrinya. Dalam

---

<sup>12</sup> Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 17.

<sup>13</sup> Ahmad Mujib Rumadi, et.al., *Intelektualisme Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), h. 1.

<sup>14</sup> Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, *op. Cit.*, h. 1.



sejarah perpolitikan di Indonesia, pengaruh kiai pada para santri sangat besar. Ketika perselisihan antara unsur-unsur NU dan Muslimin Indonesia dalam PPP tahun 1980-an memuncak, perang para politisi dan tokoh NU sangat besar dalam “menggembosi”. Ini berarti bahwa fatwa-fatwa politik para kiai dapat meyakinkan jamaah sehingga mereka mengikuti fatwa politik tersebut.<sup>15</sup>

Keterpengaruhannya perilaku politik santri oleh perilaku politik kiai tentunya didasari pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipandang benar bahkan sebagai keniscayaan yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata baik karena pertimbangan psikologis, teologis maupun sosial, sehingga jamaah benar-benar menjadi pengikut setia pada kiai dalam perilaku politik mereka.<sup>16</sup>

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas kita menyadari bahwa dunia politik merupakan akses kunci untuk meraih kekuasaan dan mengelola serta mengendalikan roda pemerintahan, maka akan sangat menarik untuk diketahui bagaimana minat santri untuk terlibat di dunia politik, untuk berpolitik, untuk menjadi penguasa atau menjadi kepala pemerintahan.

Kalimantan Selatan merupakan daerah dengan masyarakat dan budaya Islam yang kental. Lembaga pesantren dan santrinya memiliki tempat yang istimewa dalam masyarakat. Kalimantan Selatan memiliki banyak pondok pesantren; dari pondok pesantren besar hingga yang kecil, dari pesantren salafi hingga pesantren modern. Salah satu pondok pesantren yang cukup dikenal luas di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan, bahkan juga di daerah-daerah lain di

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 4.

pulau Kalimantan adalah Pondok Pesantren Al-Falah yang terletak di Landasan Ulin km. 23 kota Banjarbaru.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, meskipun pernah ada ustadz dari Pondok Pesantren Al-Falah Putera yang terjun ke dunia politik, namun hasil dari observasi awal terhadap 15 santri Pondok Pesantren Al-Falah Putera yang berada di kelas III Aliyah, ternyata 12 dari santri menyatakan tidak berminat dengan berbagai alasan yang beragam, dan hanya 3 orang menyatakan berminat, hal ini berarti bahwa hanya 20% dari santri yang berminat untuk ikut berpolitik.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka patut dilakukan pengkajian secara komperhensif untuk menggali informasi bagaimana minat santri untuk terjun berpolitik ketika ia lulus kelak. Untuk itu penulis berniat untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “Minat Santri Al-Falah Putera Kota Banjarbaru Terjun Ke Dunia Politik”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas pembahasan permasalahan di atas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana minat santri Al-Falah Putera untuk terjun ke dunia politik?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi minat santri Al-Falah Putera untuk terjun ke dunia politik?

### C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, berikut ini diberikan definisi atau batasan istilah dari judul penelitian;

1. Minat ialah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, atau (gairah).<sup>17</sup> Minat juga merupakan momen dari kecenderungan-kecenderungan yang terarah secara intensif kepada suatu objek yang dianggap penting, pada minat-minat ini selalu terdapat elemen-elemen efektif (perasaan, emosional) yang kuat. Minat juga menampilkan sikap dari pribadi, yang muncul langsung dari diri seseorang.<sup>18</sup>
2. Santri ialah orang yang mempelajari dan mendalami agama Islam,<sup>19</sup> terutama yang belajar atau mendalami ilmu agama di pesantren, sebagaimana yang dikenal luas dalam masyarakat. Masyarakat biasa menyebut orang-orang atau anak-anak yang belajar atau mendalami ilmu agama di pondok pesantren dengan sebutan santri. Kata *santri* mempunyai dua arti, *pertama*, santri sebagai murid atau orang yang belajar di pondok pesantren. *Kedua*, santri sebagai sebutan bagi kelompok orang yang memeluk agama Islam dan tergolong taat dengan memenuhi dan menjalankan ajaran Islam.<sup>20</sup> Kata *santri* dalam penelitian ini dipergunakan untuk menyebut arti yang pertama tersebut.

---

<sup>17</sup> Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, *op. cit.*, h. 744.

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Teori Kepribadian*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 78.

<sup>19</sup> James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Graaindo Persada, 1981), h. 997.

<sup>20</sup> Abdul Munir Mulkan, *Moral Politik Santri*, *op. cit.*, h. 300.

3. Al-Falah Putera Kota Banjarbaru adalah lembaga pendidikan Islam (Pondok Pesantren) yang berbasis IPTEK dan IMTAQ, berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah yang berlokasi di Jalan Achmad Yani Km. 23 Landasan Ulin Tengah Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang seluruh santri dan gurunya adalah laki-laki.<sup>21</sup>
4. Politik ialah segala urusan dan tindakan baik berupa kebijakan, siasat, mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain<sup>22</sup> berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan dalam negara.
5. Adapun kata terjun ke dunia politik dalam penelitian ini dipergunakan untuk menunjukkan arti masuk atau terlibat aktif dalam berpolitik, baik menjadi anggota atau pengurus partai, menjadi anggota legislatif, pejabat pemerintahan maupun terlibat dalam mengurus negara atau pemerintahan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu:

1. Untuk menggali data dan mengetahui minat santri Al-Falah Putera terjun ke dunia politik, dalam arti minat, niatan ataupun keinginan untuk menjadi politisi, atau untuk menjadi birokrat, atau jabatan politik lainnya.
2. Agar dapat mengetahui hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi minat santri Al-Falah Putera untuk terjun ke dunia politik.

---

<sup>21</sup> Husnul Yaqin, *Sistem Pendidikan Pesantren di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2010), h. 42

<sup>22</sup> Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, *op. cit.*, h. 886-887.

### **E. Kegunaan (Signifikansi) Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai;

1. penambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana minat santri untuk terjun kedalam dunia politik dan apa yang mempengaruhi minat tersebut;
2. informasi mengenai minat dan berbagai faktor yang mempengaruhi minat Santri Pondok Pesantren Al-Falah Putera untuk terjun ke dunia politik dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti bagi Pondok Pesantren Al-Falah sendiri, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), partai-partai politik, perguruan tinggi atau lembaga-lembaga lainnya.
3. bahan informasi untuk ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang politik ketatanegaraan dan tinjauan hukum Islam mengenai politik atau ketatanegaraan, juga sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek atau sudut pandang yang berbeda.
4. memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

## F. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna. Yang dimaksud dari pengertian di atas ialah kesimpulan penelitian yang masih belum sempurna sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian.<sup>23</sup> Anggapan dasar suatu penelitian adalah suatu yang dijadikan pijakan/titik tolak dalam melaksanakan penelitian. Anggapan dasar tidak dipersoalkan lagi kebenarannya, karena ia sudah diterima oleh umum.<sup>24</sup>

Jacob Vredenburg membedakan hipotesis dalam tiga jenis, yaitu *hipotesis universal*, *hipotesis eksistensial*, dan *hipotesis probabilitas*. Adapun bentuk hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ialah *hipotesis probabilitas* yaitu hipotesis yang mempunyai bentuk dasar yang abstrak atau keadaan “relatif lebih atau relatif kurang”. Hipotesis probabilitas didasarkan atas pengujian sampel yang memakai penegasan kriteria. Hasil dari hipotesis ini senantiasa *probable* artinya senantiasa membawa risiko–risiko kemungkinan tertentu.<sup>25</sup>

Hipotesis akan diterima jika fakta-fakta di dari hasil penelitian membenarkan, dan akan ditolak jika ternyata tidak bersesuaian dengan fakta-fakta dari hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis akan mengajukan hipotesis berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Faktor kepribadian berhubungan positif terhadap santri Al-Falah Putera untuk terjun ke dunia politik.

---

<sup>23</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Jakarta Prenada Media Group, 2006), h. 75.

<sup>24</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Antasari*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2013), h. 21.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 79.

Hipotesis 2 : Faktor agama berhubungan positif terhadap minat untuk terjun ke dunia politik bagi santri Al-Falah putera.

Hipotesis 3 : Faktor pengalaman berhubungan positif terhadap minat santri untuk terjun ke dunia politik.

Hipotesis 4 : Faktor keluarga, berhubungan positif terhadap minat santri untuk terjun ke dunia politik.

Hipotesis 5 : Faktor lingkungan berhubungan positif terhadap minat santri untuk terjun ke dunia politik.

Hipotesis 6 : Faktor pendidikan berhubungan positif terhadap minat santri untuk terjun ke dunia politik.

Di antara beberapa variabel di atas, berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan diduga variabel kepribadian (faktor internal) merupakan faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap minat untuk terjun ke dunia politik bagi santri Al-Falah putera.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Peran pesantren dalam dunia politik juga sangat dibutuhkan karena walau bagaimanapun pesantren memiliki peran yang sama dengan LSM-LSM lain pada umumnya bahkan pesantren memakai peran yang sangat strategis untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat bawah secara lebih luas untuk menyeimbangi negara.<sup>26</sup> Sehingga hubungan lingkungan lembaga pendidikan

---

<sup>26</sup> Amin Haedari, *Masa depan Pesantren*, (Jakarta: IRD Press, 2004). h. 221.

keagamaan tersebut memiliki peluang yang cukup strategis untuk menentukan alur perpolitikan nasional.

Pembacaan perpolitikan santri dipandang signifikan sekurangnya di saat kaum santri mengklaim bahwa visi dan perilaku politiknya mewakili kepentingan umat Islam sebagai mayoritas warga negara. Klaim-klaim politik representatif inilah yang perlu dicermati bukan hanya oleh pihak lain, tapi yang lebih penting ialah kritik untuk internal kaum santri itu sendiri.<sup>27</sup> Sehingga pembacaan terhadap perpolitikan santri pada masa mendatang menjadi penting untuk dilakukan.

Sikap santri pesantren sekarang ini ada dua macam; *pertama*, sikap taat dan patuh yang tinggi kepada kiaiinya, tanpa pernah membantah. Sikap ini dimiliki santri dan lulusan pesantren tradisional. *Kedua*, sikap taat dan patuh sekadarnya, sikap ini ada pada santri yang memperoleh pendidikan umum.<sup>28</sup> Dari pernyataan mengenai sikap santri tersebut menjadi sesuatu yang menarik penulis untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh kiai atau ustadz terhadap minat santri untuk berpolitik.

Beberapa kelebihan yang dimiliki pesantren sekaligus menjadi ciri pesantren yaitu:

1. Pesantren mempunyai nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme, maupun patriotisme.
2. Tradisi pesantren tidak ada pembatasan peserta didik. Dengan demikian strata sosial tidak menjadi hambatan.
3. Pada umumnya di pesantren ada tradisi fiqh yang dianut.

---

<sup>27</sup> Abdul Munir Mulkan, *Moral Politik Santri*, *op. cit.*, h. V.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 5.



4. Pesantren mengenal tradisi *tasawuf*. Ketika berbicara masalah *tasawuf* akan terlihat inklusifitasnya. Bahkan sekat-sekat agama tidak diperhatikan sama sekali.
5. Dalam pesantren juga ada kebiasaan akomodasi yaitu perubahan yang dilakukan haruslah perlahan-lahan, tidak revolusioner.<sup>29</sup>

Denis Lombard menyatakan bahwa pesantren mempunyai kesinambungan dengan lembaga keagamaan pra-Islam disebabkan adanya beberapa kesamaan antara keduanya. Misalnya letak dan posisi keduanya cenderung mengisolasi diri dari pusat keramaian, serta adanya ikatan “kebapakan” antara guru dan murid sebagaimana ditunjukkan kiai dan santri, disamping kebiasaan ber-*‘uzlah* (berkelana) guna melakukan pencarian ruhani dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>30</sup> Nurcholis Madjid menegaskan bahwa pesantren adalah artifak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik dan *indigenus*.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini akan diketahui apakah faktor eksternal (pengaruh keluarga, agama dan lingkungan pendidikan) ataupun faktor internal (psikologis) yang mempengaruhi minat santri Al-Falah putera untuk terjun ke dunia politik.

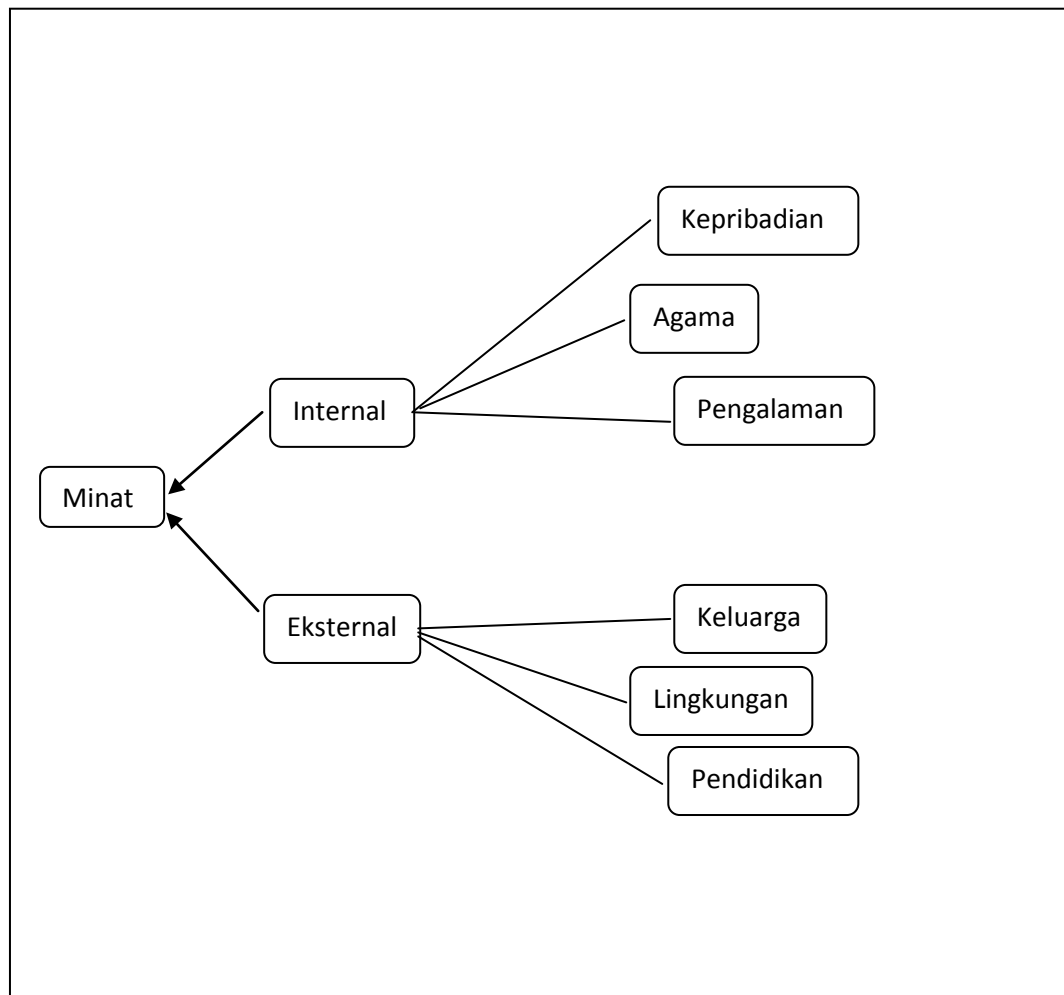
---

<sup>29</sup> Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, op. Cit. h. 21-22.

<sup>30</sup> Amin Haedari, et. al., *masa depan pesantren*, (Jakarta: IRD Press, 2004). h. 3.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 3.

GAMBAR: 1.1. Kerangka Pemikiran



## H. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis telah mengkaji berbagai literatur yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti, baik berupa buku-buku maupun skripsi-skripsi terdahulu. Beberapa buku yang penulis jadikan sebagai referensi ialah buku *Pemikiran Politik Islam* oleh Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Intelektualisme Pesantren* oleh Ahmad Mujib, dan *Islam dan Tata Negara* oleh Munawir Syadzali.

Adapun skripsi yang mengkaji berbagai hal mengenai politik atau perpolitikan juga telah banyak ditulis, baik dalam bentuk penelitian literatur, maupun dalam bentuk penelitian lapangan.

Penelitian dalam bentuk penelitian lapangan yaitu seperti penelitian skripsi yang dilakukan M. Nasir Danhas/021135089 pada tahun 2007 dengan judul *Presepsi Masyarakat Terhadap Keterlibatan Ulama Dalam Berpolitik Di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin*.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan yang bersifat studi sampling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui presepsi masyarakat terhadap keterlibatan ulama dalam berpolitik di kecamatan Banjarmasin barat kota Banjarmasin, untuk mengetahui alasan presepsi masyarakat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap presepsi masyarakat tersebut.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah 21 responden (84%) berpendapat dibolehkannya ulama terlibat dalam kegiatan politik, dengan alasan bahwa setiap warga negara berhak untuk berpolitik, tidak ada aturan agama yang melarangnya dan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dan presepsi kedua yaitu 4 orang (16%) responden berpendapat tidak dibolehkan hukumnya ulama terlibat dalam kegiatan politik, dengan alasan dapat membuat pertentangan di masyarakat dan akan terbawa dalam perbuatan yang haram.

Menurut tinjauan hukum Islam setiap orang adalah berhak berpolitik bahkan menganggap politik merupakan bagian penting yang berkaitan dengan penataan persoalan kehidupan masyarakat.

Selain penelitian skripsi di atas, juga ada penelitian skripsi oleh Mahrita/0101134401 pada tahun 2007 dengan judul *Presepsi Ulama Tapin Terhadap Perempuan Dalam Partai Politik*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi ulama kabupaten Tapin terhadap keterlibatan perempuan dalam partai politik. Dan untuk mengetahui alasan persepsi ulama kabupaten Tapin terhadap keterlibatan perempuan dalam partai politik.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bervariasi. Ada yang membolehkan dengan alasan perempuan sama derajatnya dengan laki-laki, dan perempuan sebagai penunjang dan pelengkap di pemerintahan. Ada yang tidak membolehkan dengan alasan karena kaum laki adalah pemimpin kaum perempuan dan perempuan punya berbagai macam halangan.

Kedua penelitian skripsi di atas penulis jadikan sebagai kajian pustaka, karena isi dan fokus masalah dari keduanya berkenaan dengan dua hal utama dalam penelitian ini, yaitu politik dan Islam atau perpolitikan dalam Islam. Dilihat dari segi metodologi dan jenis penelitian, penelitian M. Nasir Danhas dan Mahrita tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian ini, sehingga pola analisisnya relatif tidak jauh berbeda. Namun penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian yang tersebut. Karena penelitian ini lebih difokuskan untuk mengetahui minat santri terhadap perpolitikan dan bukan terhadap persepsinya.

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah santri yang masih tergolong sebagai pelajar dan bukan terhadap masyarakat, kiai, ustadz atau pengajar lainnya dan kedua penelitian skripsi di atas tidak menjadikan santri

sebagai subjek sedangkan subjek kedua penelitian di atas adalah para pengajar, bukan pelajar. Adapun kedua penelitian di atas memfokuskan pada persepsi atau pandangan masyarakat ataupun terhadap ulama yang berpolitik atau terhadap peran kiai dalam politik.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat dan menggambarkan kerangka dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran hal yang akan diteliti, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab dalam penelitian, definisi operasional yang merupakan definisi dasar untuk menunjang dalam operasional penelitian, tujuan penelitian yang berupa target-target yang dituju dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat/kegunaan yang diinginkan dengan adanya penelitian ini, lalu kemudian dilanjutkan pada bagian hipotesis yang merupakan penguraian hipotesa dari permasalahan yang akan diteliti. Dan kemudian bagian kerangka pemikiran yang menyajikan gambaran pokok-pokok pikiran dan jalinannya satu dengan yang lain didasarkan pada satu teori atau lebih sebagai sketsa yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk bagan secara sistematis, dan tinjauan pustaka yang merupakan acuan dasar dan sebagai perbandingan hasil penelitian lalu kemudian sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini.

Pada bab II akan digali mengenai berbagai landasan teori yang berkenaan dengan hal yang akan diteliti seperti teori politik, teori minat serta teori agama dan politik. Selanjutnya, pada bab III terdapat berbagai metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis, lokasi, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, dan teknik analisis data.

Dalam bab IV akan mengupas mengenai laporan hasil penelitian yang terdiri dari berbagai penyajian data hasil penelitian di lapangan, berbagai tinjauan lain dan analisis dari data yang dihasilkan.

Terakhir yaitu bab V merupakan penutup yang di dalamnya terdiri dari simpulan dan saran-saran. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran lainnya.